BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa

Analisa kredit adalah cara yang digunakan oleh suatu perusahaan, Bank, Instansi dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman kredit pada debitur. Dalam hal ini yang berperan adalah Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dalam Bab ini penulis akan mengemukakan analisa terhadap prosedur pemberian kredit yang telah dilaksanakan serta menemukan adanya kemacetan dalam pengembalian tunggakan atau hutang.

Disamping adanya hambatan-hambatan yang ada di alami oleh KPKB mengenai macetnya kredit tersebut juga faktor lain yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan prosedur ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh KPKB yaitu dalam proses pemberian kredit oleh uang kepada para Debitur (Anggota koperasi) yang masih mempunyai tunggakan/hutang.

Untuk proses pemberian kredit uang itu sendiri memang KPKB telah melakukan suatu pertimbangan-pertimbangan akan tetapi penulis melihat meskipun berbagai pertimbangan dan jaminan telah dilakukan namun hambatan saja ada. Karena itu apabila ditinjau dari proses pemberian kredit itu selalu beresiko baik timbul kemacetan maupun tunggakan yang berlarut-larut.

4.1.1 Bagaimana Fungsi dan Peranan KPKB

Koperasi KPKB sebagai koperasi simpan pinjam berbentuk koperasi serba usaha yang dirasakan benar manfaatnya oleh anggota adalah unit usaha simpan pinjam yang memberikan pinjaman atau kredit untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya baik berupa uang, barang maupun jasa.

Koperasi KPKB berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan menurut ajaran dan falsafah Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan khususnya kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berserta penjelasannya yaitu:

> **"Bahwa tujuan koperasi sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam menumbuhkembangkan kekuatan perekonomian bangsa maka jalur pembinaan melalui koperasi sebagai salah satu kegiatan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang dicita-citakan".**

Koperasi KPKB berfungsi dan berperan sebagai alat pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya sesuai dengan fungsi koperasi.

4.1.2 Bagaimana kaitannya dengan tujuan kredit, unsur-unsur kredit, dan fungsi kredit.

A. Tujuan Kredit

Berdasarkan tujuan kredit, KPKB telah dapat mengkaji dan menganalisa sesuai dengan tujuan pemberian kredit secara umum antara lain :

a. Dengan berdirinya KPKB maka KPKB telah turut menyukseskan pemerintah dalam pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.

b. Untuk memperoleh laba agar kelangsungan hidup KPKB termin, sehingga dapat lebih meningkatkan perluasan usahanya.

B. Unsur-unsur Kredit

Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) memberikan pemberian kredit pada anggotanya dengan keyakinan bahwa debitur (anggota koperasi) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPKB.

Beserta pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Masalah kepercayaan.

b. Masalah waktu.

c. Masalah tingkat resiko (Degree of Risk)

d. Masalah prestasi.

C. Fungsi Kredit

KPKB sebagai pemilik modal atau uang secara langsung memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Dilihat dari fungsi kredit, maka KPKB memberikan pinjaman dalam bentuk:

a. Pemberian kredit uang.

b. Pemberian kredit barang.

c. Barang niaga.

d. Jasa.

4.1.3 Permodalan dan Jumlah Debitur

Dilihat dari segi Analisa dan Rasio dapat dihubungkan dengan tujuan umum suatu analisa, adalah :

a. Menentukan tingkat liquiditas.

b. Mengukur efektifitas.

c. Mengukur derajat keuntungan dan

d. Mengetahui gambaran baik buruknya keadaan suatu instansi dan perusahaan.

Maka jika dihubungkan dengan keadaan/perubahan tentang adanya penurunan banyaknya peminjam pada tahun sebelumnya dengan tahun-tahun berikutnya terlihat dengan jelas bahwa keadaan permodalan KPKB meningkat, karena jumlah dana untuk memenuhi kebutuhan pinjaman kredit uang tersedia meskipun jumlah debitur dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Seperti dalam pembahasan sebelumnya dengan adanya debitur (Anggota KPKB) yang banyak melakukan pinjaman selain pada KPKB juga meminjam uang dari pihak Bank. Mungkin mengenai hal ini mengakibatkan jumlah debitur menurun, karena dengan adanya anggapan lebih mudah realisasinya pada Bank atau juga merasa mendapatkan kredit uang dari pada KPKB tersebut masih dirasakan kurang.

Untuk hal aliran dana/permodalan jika dilihat dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa permodalan dari tahun ke tahun mengalami tambahan kemajuan yang lebih besar. Dengan target semakin banyak jumlah debitur dan meningkatnya jumlah permodalan diharapkan KPKB telah mencapai dan mampu untuk memperoleh keuntungan/laba karena suatu instansi atau perusahaan itu dikatakan baik apabila telah

adanya peningkatan dalam hal jumlah debitur maupun permodalan dan jumlah keuntungan atau laba yang diperoleh.

Permodalan yang semakin meningkat didapat dan diperoleh dari:

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Simpanan 12 Juli
4. Simpanan Wajib Khusus
5. Simpanan yang berasal dari SHU
6. Tambahan modal KPKB yang diperoleh dari penyisihan SHU pada setiap akhir laporan dan sisa tahun sebelumnya yang sesuai dengan aturan pembagian SHU serta dana cadangan lainnya.

4.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi KPKB dalam Pemberian Kredit Uang

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh serta, penganalisaan pemberian kredit uang sebagai salah satu kegiatan usaha yang ada di unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) dimana dari tahun ke tahun permintaan pinjaman kredit uang dan jumlah Debitur semakin meningkat, dilihat dari segi peningkatan tersebut penulis melihat adanya perkembangan yang cukup baik, akan tetapi kalau dilihat dari segi lainnya perkembangan dan kemajuan tersebut tidak terlepas dari pada hambatan-hambatan yang merintangi dalam mencapai tujuan KPKB dalam mensejahterakan angotanya, juga melancarkan pembangunan dalam bidang ekonomi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPKB salah satunya adalah hambatan dalam pemberian pelayanan kredit uang kepada para anggota Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketelatan setoran dari para bendaharawan gaji masing-masing wilayah.

   Hal ini mungkin diakibatkan dari para debitur/anggota sendiri yang tidak tepat waktu dalam pengangsuran bulanan sehingga hal ini akan menyebabkan proses pemberian kredit uang akan terhambat karena salah satu sistem/cara yang digunakan dalam pemberian kredit uang oleh KPKB adalah perputaran uang.

2. Kegiatan piutang anggota yang membayar angsuran selalu mengalami pemogokan/tunggakan dikarenakan adanya pembayaran pada Bank.

   Hal ini terjadi karena para anggota koperasi itu sendiri meminjam uang pada Bank sehingga angsuran yang seharusnya disisihkan setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, namun hal ini tidak terjadi sama sekali, sehingga koperasi (KPKB) disini lebih banyak berperan sebagai orang kedua setelah Bank dalam hal pembayaran hutang atas pinjaman uang secara kredit tersebut. Jika ditinjau keadaan ini sangat tidak baik dengan adanya jaminan pegawai/anggota sama sekali tidak berfungsi.

3. Menurut data dari informasi yang penulis dapat, hambatan sering timbul pula dari anggota koperasi yang mengalami masa pensiun dan pada masa pensiunya itu masih memiliki tunggakan/hutang pada KPKB.

   Hambatan sendiri adalah karena anggota yang sudah pensiun tersebut, dalam hal keuangan sudah tidak ada lagi kaitannya lagi dengan bendaharawan pemegang gaji

unit kerja karena sudah dilimpahkan kepada badan yang mengelola keuangan pensiunan, sedangkan koperasi belum mempunyai jaringan koordinasi dengan badan pengelola pensiunan tersebut.

4. Sampai saat ini permasalahan yang paling potensil terhadap macetnya pengembalian pinjaman/pembayaran tunggakan (hutang adalah kurangnya kesadaran anggota koperasi dan sistem penagihan yang kurang aktif serta disiplin yang lemah dari perjanjian yang telah ditentukan dalam Prosedur Pemberian Kredit Uang serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) yang dalam hal ini berpean sebagai kreditur.

5. Adanya penyimpangan ketentuan, yaitu jumlah piutang yang semakin besar diakibatkan karena adanya anggota yang masih mempunyai hutang masih dapat mengajukan pinjaman.

6. Karena KPKB tidak mengadakan penyitaan barang atas para peminjam yang mempunyai tunggakan dan harus pengembalian kredit itu dalam bentuk uang maka cenderung penagihan akan terasa pasif sehingga tunggakan para peminjam untuk segera dilunasi itu kurang terjamin.

4.3 Usaha Penanggulangan Hambatan-hambatan yang dilakukan oleh KPKB

Dalam usaha untuk memperkecil tidak terjadinya hambatan-hambatan yang selalu dihadapi oleh KPKB, maka KPKB harus benar-benar dapat menanggulanginya, berbagai cara yang dilakukan oleh KPKB, antara lain :

1. Dalam menanggulangi masalah pengumpulan dana, adalah :
   a. Karena pengumpulan piutang/pembayaran tunggakan pada bendaharawan gaji unit kerja masing-masing adalah hal yang utama karena hal ini dapat menjamin kembalinya dana/permodalan secara tepat waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanggil bendaharawan gaji kerja tertentu untuk diminta pertanggung jawabannya mengenai keterlambatan dalam penyetoran.
   b. Mengadakan pinjaman antara Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) dalam hal ini antara lain dengan perolehan Modal Asing yaitu dengan pihak Bank.
2. Dalam usaha memperkecil tidak tertagihnya piutang/adanya tunggakan, maka KPKB benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada perencanaan tentang jumlah peminjam kredit uang yang akan disalurkan satu tahun.
3. Untuk para pensiunan dikarenakan anggaran keuangan sudah tidak dikoordinir oleh bendaharawan gaji unit kerja KPKB maka Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) memberlakukan kepada para pensiunan itu untuk membayar angsuran tunai dan pembayarannya langsung pada KPKB dan tidak mengandalkan angsuran bulanan dan pemotongan gaji setiap bulannya.
4. Untuk mencegah macetnya pembayaran tunggakan/hutang atas kredit uang maka KPKB dalam memberikan kredit uang itu menyeleksi dengan ketat kriteria para peminjam, antara lain :

a. Kriteria lancar.

Yaitu anggota peminjam yang membayar kurang dari jangka waktu jatuh tempo dalam setiap bulannya.

b. Kriteria kurang lancar.

Yaitu anggota yang menunggak sampai jangka waktu tiga bulan dari jatuh temponya.

c. Kriteria macet.

Yaitu anggot apeminjam yang menunggak lebih dari 3 bulan.

Dengan adanya pemilihan kriteria tersebut diharapkan para anggota yang termasuk dalam kriteria kurang lancar dan macet dapat melunasi tunggakannya dalam kaitan ini KPKB memberikan tahapan untuk kemudahan, yaitu :

a. KPKB memberikan waktu 3 bulan dari jangka waktu jatuh tempo.

b. Apabila waktu tersebut anggota juga tidak membayar selanjutnya koperasi memberikan surat teguran.

c. Disamping pendisiplinan pada pemotongan gaji bulanan atau angsuran bulanan dilakukan secara tepat dan teratur.

5. Koperasi Pegawai Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) akan bersikap tegas melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan pada para anggota koperasi yang meminjam uang dan mempunyai tunggakan/hutang.

6. Membuat penerapan penagihan secara lebih aktif.